OMBUDSMAN GELAR DEKLARASI ANTI MALADMINISTRASI

Rabu, 17 Januari 2018 - Razanah Balqis

Wujudkan Sulawesi Barat bebas maladministrasi, Ombudsman bersama Wakapolda Sulawesi Barat dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat serta para Ketua DPRD dan sejumlah perwakilan Bupati se-Sulawesi Barat menandatangani deklarasi anti maladministrasi yang diprakarsai Ombudsman RI Sulbar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulbar, (17/01/18).

Kegiatan ini sebagai langkah nyata Ombudsman membangun komitmen mewujudkan Sulawesi Barat bebas maladministrasi dan terciptanya pelayanan publik yang baik, bersih dan melayani.

Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah adalah adanya komitmen para Kepala Daerah dengan unit pelayananan publik serta para pemangku kepentingan terkait, melalui komitmen yang kuat akan menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat diberikan secara cepat dan transparan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar menegaskan kehadiran Ombudsman Republik Indonesia hendaknya dimanfaatkan dengan baik oleh setiap Kepala Daerah karena Ombudsman adalah jembatan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik dalam hal menerima keluhan yang dirasakan masyarakat terkait kinerja dan pelayanan birokrasi pemerintahan yang kemudian menjadi bahan evaluasi melakukan perbaikan.

"Keberadaan Ombudsman ini sedianya dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, dibidang pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi yang menjadi titik awal terjadinya tindakan korupsi," terang Lukman Umar.

Ombudsman RI Sulbar mengapresiasi kehadiran semua pihak utamanya Jajaran Polda Sulawesi Barat, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Mamuju Tengah, Polman dan Majene termasuk perwakilan para Bupati dari 6 Kabupaten. ||red (HumasORISulbar).

Sumber:Â http://www.skornews.com/skor-ombudsman-gelar-deklarasi-anti-maladministrasi.html#.Wl89J5WsxKs.facebook